

## Upgrading Tata Kelola Perguruan Tinggi Baru di ITBK Muhammadiyah Muna Barat Sulawesi Tenggara

**Dwi Cahyono\*<sup>1</sup>, Rasid<sup>2</sup>, La Ode Muhammad Ady Ardyawan<sup>3</sup>, Evi Lestari<sup>4</sup>,  
Muh. Bayu<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

<sup>3</sup>ISTEK Aisyiah Kendari, Indonesia

<sup>4,5</sup>Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

\*e-mail: [dwicahyono@unmuhjember.ac.id](mailto:dwicahyono@unmuhjember.ac.id)<sup>1</sup>, [rasidnursam61@gmail.com](mailto:rasidnursam61@gmail.com)<sup>2</sup>, [ardyanady@gmail.com](mailto:ardyanady@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[evilestari@umberau.ac.id](mailto:evilestari@umberau.ac.id)<sup>4</sup>, [muhbayu@umberau.ac.id](mailto:muhbayu@umberau.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini melalui Upgrading Tata Kelola Perguruan Tinggi sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik pengelolaan perguruan tinggi, serta meningkatkan SPMI perguruan tinggi agar bisa secepatnya meningkatkan kepuasan orang tua mahasiswa, mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikan. Terbukti pemahaman dari materi yang di sampaikan seperti (1) Sosialisasi Lima Permendikbud Sebagai Payung Hukum Kampus Merdeka (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi, meningkat secara cukup signifikan setelah mengikuti upgrading ini. Di masa yang akan datang, pengabdian semacam ini dapat diperluas konteksnya untuk mendapatkan luaran yang lebih komprehensif, misalnya pelatihan akreditasi yang berbasis BAN PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

**Kata kunci:** Manajemen Perguruan Tinggi, SPMI, Upgrading

### Abstract

This community service activity (PKM) through Upgrading Higher Education Management is needed to improve the understanding and practice of tertiary management, as well as to improve the SPMI of tertiary institutions so that they can immediately increase the satisfaction of parents of students, students, lecturers and education staff. It is evident that the understanding of the material presented, such as (1) Socialization of the Five Regulations of the Minister of Education and Culture as the Legal Umbrella for an Independent Campus (2) Higher Education Database (PDDikti) (3) Internal Quality Assurance System in Higher Education, increased quite significantly after attending this upgrading. In the future, this kind of service can be expanded in context to obtain more comprehensive outputs, for example accreditation training based on BAN PT or Independent Accreditation Institutions.

**Keywords:** Higher Education Management, SPMI, Upgrading

## 1. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi Swasta tetap menjadi andalan Pemerintah dalam pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi. Saat ini APK Pendidikan Tinggi di Indonesia berada pada kisaran 34 persen, lebih rendah dari Malaysia dengan APK berkisar 50 persen dan Singapura berkisar 78 persen. Jika kondisi PTS banyak yang bermasalah, maka kondisi ini akan berdampak negatif terhadap APK Indonesia. [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, diyakini menjadi ujung tombak pengembangan kualitas sumber daya manusia. Peran strategis yang dimiliki lembaga pendidikan tinggi menjadikan perhatian terhadap peningkatan kualitasnya semakin gencar dilakukan. (Binangkit & Siregar, 2020)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 120/E/0/2022 tentang Izin Pendirian Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Muna Barat di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, tertanggal 7 Maret 2022 dengan program studi (1)Teknik Sipil Program Sarjana;(2)Administrasi Kesehatan Program Sarjana;(3) dan Kewirausahaan Program Sarjana.(Ramadhani, 2021). Kabupaten Muna Barat atau disingkat Mubar merupakan salah satu

kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil pemekaran dari Kabupaten Muna pada pertengahan tahun 2014, melalui Undang Undang Nomor 14 tahun 2014 mengenai Pembentukan Kabupaten Muna Barat. Ibu kota Kabupaten Muna Barat terletak di Laworo, kecamatan Sawerigadi. Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Muna Barat merupakan satu-satu perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Muna Barat.

Proses pendirian Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Muna Barat mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62/E/KPT/2020. Mengenai Persyaratan Dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik.(Kemenristekdikti, 2019). Sebagai perguruan tinggi baru tentu harus cepat menyesuaikan dengan regulasi yang ada seperti pemenuhan SNPT yaitu permendikbud no 3 tahun 2020. Apalagi tata kelola kampus atau perguruan tinggi sangat penting terutama di era modern yang serba kompetitif seperti saat ini. Setiap perguruan tinggi pun memiliki profilnya masing-masing. Serta ketika kita melihat profil tersebut selalu ada keunggulan dan prestasi yang telah diraihinya. Yang menjadikan sebuah perguruan tinggi berkualitas tidak terlepas dari tata kelolanya.

Berdasarkan analisis situasi tersebut *Upgrading* Tata Kelola Perguruan Tinggi sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik pengelolaan perguruan tinggi, serta meningkatkan SPMI perguruan tinggi agar bisa secepatnya meningkatkan kepuasan orang tua mahasiswa, mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikan. Menurut (Prasetyo & Husaini, 2021) menyelidiki efek dan praktek pengendalian mutu pada Perguruan Tinggi Keagamaan dari hasil penelitiannya menunjukkan (1) pengendalian mutu mengacu pada konsep siklus daur hidup organisasi yang terdiri dari yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, (2) proses implementasi mengacu pada sasaran teknis seperti kelengkapan formal pembelajaran, (3) peningkatan kompetensi profesionalisme dosen dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta studi banding, (4) kegiatan monitoring evaluasi peningkatan mutu dilakukan melalui rapat rutin mingguan, rapat tengah semester dan rapat awal tahun pelajaran.

## 2. METODE

*Upgrading* merupakan sebuah kegiatan pelatihan peningkatan mutu, pengetahuan, dan ilmu berorganisasi. Kegiatan ini berguna untuk mengupgrade pesertanya agar bisa menyadari fungsi masing-masing didalam pengelolaan kampus yang baru berdiri. Kegiatan ini juga berguna untuk membangun semangat pengelolaan sesuai dengan regulasi dan tata kelola perguruan tinggi. *Upgrading* dilaksanakan pada tanggal 7-8 September 2022 bersama Dr. Dwi Cahyono,M.Si.Akt, (Universitas Muhammadiyah Jember), Dr.Rasyid.MPd, (Universitas Muhammadiyah Kendari), La Ode Muhammad Ady Ardyawan S.kep N.s M.kes (ISTEK Asyiah Kendari), Dr. Evi Lestari.M.Si. dan Dr.Muh.Bayu.MM (Universitas Muhammadiyah Berau). Kegiatan dilaksanakan di Gedung Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Muna Barat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Sosialisasi Lima Permendikbud Sebagai Payung Hukum Kampus Merdeka

Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Muna Barat lahir pada saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di pimpin oleh Nadiem Makarim. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sosialisasikan lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) sebagai payung hukum dari implementasi empat kebijakan baru Kemendikbud bidang pendidikan tinggi, bahwa kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menjadi dasar perguruan tinggi dalam menjalankan program dan kegiatan. Ada empat kebijakan penting dalam Kampus Merdeka yaitu Pembukaan Program Studi Baru, Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Badan Hukum dan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi yang setiap

kebijakannya memiliki payung hukum masing-masing. Kebijakan Pembukaan Program Studi Baru diatur dalam Permendikbud No.5 dan 7, Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi diatur dalam Permendikbud No.5, Perguruan Tinggi Badan Hukum pada Permendikbud No. 4 dan 6 serta Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi dipayungi Permendikbud no.3 tahun 2020.

Lima Peraturan Mendikbud (Permendikbud) sebagai landasan penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dan Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Regulasi itu pentingnya sekali disampaikan agar sebagai perguruan tinggi baru dapat mempersiapkan tata kelola manajemen yang baik.

### 3.2. Penjelasan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) juga disampaikan dalam *Upgrading* Tata Kelola Perguruan Tinggi Baru di ITBK Muhammadiyah Muna Barat Sulawesi Tenggara. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang sudah terintegrasi secara nasional. PDDikti menjadi basis data tunggal dalam menyediakan data yang lengkap dan valid terkait data pokok pendidikan tinggi, data referensi pendidikan tinggi, dan data transaksional pendidikan tinggi. Tujuan PDDikti dalam mengumpulkan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi akan dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi. Sedangkan cakupan kerja dan kewenangan PDDikti adalah pengelolaan data pendidikan tinggi tingkat nasional.

PDDikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi: lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi; pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

### 3.3. Penjelasan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi

Tujuan **penjaminan mutu** adalah memelihara dan meningkatkan **mutu** pendidikan **tinggi** secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma **perguruan tinggi**. Perguruan tinggi di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan dalam berbagai aspek. Terlebih pada era globalisasi ini, dimana perubahan yang terjadi adalah dampak dari persaingan bebas, maka kualitas sumber daya manusia pun perlu ditingkatkan. Pasca pandemi COVID-19, berbagai sektor di Indonesia pun mengalami pemulihan dan semakin dinamis. Dalam hal ini pula, insan individu diharapkan untuk mengembangkan 'self-empowering' untuk lebih kreatif dan inovatif. Perubahan tak dapat dihindari, ditambah lagi, Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2045 mendatang. Hal ini akan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka, perguruan tinggi harus meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan untuk membentuk SDM yang mampu membangun masa depan.

Dalam *Upgrading* ini selalu diingatkan apakah SPMI yang dokumennya disusun dengan susah payah sudah berfungsi dengan optimal? Sudahkah semua unsur dalam lembaga pendidikan menggunakan SPMI sebagai acuan kerjanya? Sudahkah dokumen SPMI yang dimiliki telah mutakhir, lengkap, mendukung Visi dan mudah diakses? Sudahkah standar-standar yang telah disusun dilaksanakan dengan sebaik-baiknya? Sudahkah SPMI berkontribusi bagi pencapaian mutu dan akreditasi lembaga pendidikan?

Oleh karena peserta terus diberikan motivasi untuk menjalankan siklus penjaminan mutu yang terdiri pembuatan Norma, Standar, Pedoman, Manual yang kemudian dilanjutkan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Rencana Mutu dan Prosedur Mutu, Kemudian dilanjutkan dengan

pelaksanaan dan monitoring yang diimbangi dengan perbaikan Sistem Penjaminan Mutu dan Rencana Tindakan Mutu serta Tindakan Koreksi, yang akhirnya siap untuk melakukan Audit Mutu Internal untuk dijadikan pengukuran dan evaluasi diri.



Gambar 1. Penjelasan Narasumber



(a)



(b)



(c)

Gambar 2. Kegiatan Pengabdian: (a) Penjelasan Narasumber (b) Peserta Pelatihan (c) Saat datang di Kampus Baru

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan pelatihan dan evaluasi hasil, penulis menyimpulkan sebagai berikut: (1) pemahaman Tata Kelola Perguruan Tinggi Baru di ITBK Muhammadiyah Muna Barat Sulawesi Tenggara meningkat secara cukup signifikan. Salah satu fokus materi dalam pelatihan ini adalah berkaitan dengan mapping SNPT dalam Permendikbud no 3 Tahun 2020. (2) Pemahaman berkaitan dengan pentingnya Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) meningkat secara cukup signifikan setelah mengikuti upgrading ini. (3) Sedangkan pemahaman terhadap SPMI meningkat secara cukup signifikan. Peserta termotivasi untuk menjalankan siklus penjaminan mutu yang terdiri pembuatan Norma, Standar, Pedoman, Manual yang kemudian dilanjutkan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Rencana Mutu dan Prosedur Mutu, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan dan monitoring yang diimbangi dengan perbaikan Sistem Penjaminan Mutu dan Rencana Tindakan Mutu serta Tindakan Koreksi, yang akhirnya siap untuk melakukan Audit Mutu Internal untuk dijadikan pengukuran dan evaluasi diri.

Secara umum, pengabdian ini merupakan bagian dari proses panjang peningkatan Tata Kelola Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan dalam berbagai aspek. Terlebih pada era globalisasi ini, dimana perubahan yang terjadi adalah dampak dari persaingan bebas, maka kualitas sumber daya manusia pun perlu ditingkatkan. Pasca pandemi COVID-19, berbagai sektor di Indonesia pun mengalami pemulihan dan semakin dinamis. Dalam hal ini pula, insan individu diharapkan untuk mengembangkan 'self-empowering' untuk lebih kreatif dan inovatif. Perubahan tak dapat dihindari, ditambah lagi, Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2045 mendatang. Hal ini akan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka, perguruan tinggi harus meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan untuk membentuk SDM yang mampu membangun masa depan. Di masa yang akan datang, pengabdian semacam ini dapat diperluas konteksnya untuk mendapatkan luaran yang lebih komprehensif, misalnya pelatihan akreditasi yang berbasis BAN PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Binangkit, I. D., & Siregar, D. I. (2020). Internasionalisasi dan Reformasi Perguruan Tinggi: Studi Kasus Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 4(2), 131. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v4n2.p131-138>
- Kemristekdikti. (2019). Kebijakan Baru Kemristekdikti Dalam Pendirian/Penggabungan Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi. *Education*.
- Prasetyo, M. A. M., & Husaini, H. (2021). Efektivitas Pengelolaan Mutu Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. *IMPROVEMENT Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*, 8(1), 29-39. h
- Ramadhani, F. (2021). *Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi universitas andalas programpascasarjana*. 2-4.

## Halaman Ini Dikосongkan